PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN GOTONG ROYONG DI RT 002/RW 001, LINGKUNGAN I, BANDAR JAYA BARAT, LAMPUNG TENGAH

Disusun Oleh:

ANNISA SHOFA AZKIA

2416041076

REGULER C

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gotong royong merupakan nilai budaya yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Koentjaraningrat (1974) menyebut gotong royong sebagai salah satu sistem nilai inti dalam masyarakat Indonesia yang menekankan kerja sama, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Sejak masa agraris hingga modern, gotong royong menjadi ciri khas interaksi sosial yang mencerminkan kepedulian antarwarga. Walaupun memiliki istilah berbeda di berbagai daerah, esensi gotong royong tetap sama, yakni keterlibatan warga secara sukarela untuk kepentingan bersama. Namun, dalam konteks administrasi publik, gotong royong tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Praktik gotong royong di tingkat lokal, seperti RT/RW, dapat dilihat sebagai bentuk *community participation* yang berkontribusi langsung pada tercapainya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis sekaligus mendukung proses pembangunan. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan secara fisik dalam suatu aktivitas, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab, serta rasa memiliki terhadap lingkungan sosialnya. Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat secara tradisional terwujud melalui budaya gotong royong, yakni kerja sama dan saling membantu antarwarga untuk mencapai tujuan bersama. Secara konseptual, partisipasi dapat dipahami sebagai keterlibatan individu secara sadar dalam interaksi sosial pada situasi tertentu. Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan berpartisipasi apabila ia merasa menjadi bagian dari kelompok melalui

proses berbagi nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, serta tanggung jawab bersama. Bailah (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan setiap warga negara yang memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga yang sah sebagai perwakilan kepentingannya. Partisipasi ini dipandang sebagai wujud kebebasan untuk menyampaikan pendapat sekaligus memberikan kontribusi konstruktif terhadap pembangunan. Secara konseptual, Cohen dan Uphoff (1980) menguraikan partisipasi dalam tiga dimensi utama, yaitu sebagai proses, sebagai instrumen, dan sebagai tujuan pembangunan. Sementara itu, Arnstein (1969) melalui bukunya "*Ladder of Citizen Participation"* mengidentifikasi tingkatan partisipasi mulai dari bentuk manipulasi hingga pada tingkat pengendalian penuh oleh masyarakat, yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Dari berbagai pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses sosial, khususnya terkait pembangunan serta pengambilan keputusan.

Partisipasi mencakup kesadaran dan keikutsertaan dalam interaksi sosial, berbagi nilai dan tanggung jawab bersama, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan kontribusi konstruktif demi kemajuan bersama. Dalam konteks ini, gotong royong merupakan bentuk nyata dan khas dari partisipasi masyarakat di Indonesia, dan telah diwariskan turun-temurun sebagai nilai budaya yang mempererat solidaritas sosial. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun gotong royong memiliki peran penting dalam teori administrasi publik, terutama dalam konteks *community participation, dan good governance.* Partisipasi ini dipandang sebagai strategi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Melalui keterlibatan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi pemerintahan. Dalam kerangka good governance, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pelanggan pelayanan publik, tetapi juga sebagai pemilik negara yang turut

menentukan arah pembangunan. Partisipasi publik juga memungkinkan adanya mekanisme kontrol sosial, meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan (Mardiyanta, 2013).

Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipahami sebagai praktik sosial, tetapi juga telah dilembagakan dalam kerangka hukum dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan urgensi keterlibatan masyarakat melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya, menekankan bahwa masyarakat wajib dilibatkan pada setiap tahapan perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa, kelurahan, hingga daerah. Salah satu instrumen utama yang mewadahi partisipasi tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, usulan program, serta kebutuhan prioritas mereka. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus mengedepankan prinsip keterlibatan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam Pasal 54 UU Desa, ditegaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum utama bagi masyarakat dalam merumuskan kebijakan desa, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa, hingga kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga. Dengan demikian, nilai gotong royong dapat dipahami sebagai wujud nyata dari prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai upaya untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan lokal dalam proses pembangunan. LKD berperan sebagai motor penggerak partisipasi warga, fasilitator dalam penyelenggaraan

kegiatan bersama, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) pun menjadi agenda rutin pemerintah yang bertujuan mempertahankan nilai gotong royong di era modern. Melalui program ini, pemerintah mendorong keterlibatan warga dalam gotong royong, pembangunan sarana prasarana umum, serta kegiatan sosial-budaya yang memperkuat solidaritas sosial. Namun demikian, meskipun regulasi dan program sudah banyak dicanangkan, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan motivasi yang sama untuk berpartisipasi. Faktor kesibukan, perubahan gaya hidup, serta lemahnya kepemimpinan lokal sering menjadi penghambat optimalisasi kebijakan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kombinasi antara dukungan regulasi yang kuat, peran aktif masyarakat, dan kepemimpinan lokal yang mampu menggerakkan solidaritas. Dalam konteks ini, gotong royong dapat dipahami sebagai bentuk konkret implementasi kebijakan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat, sekaligus sebagai warisan budaya yang terus relevan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Fenomena umum yang dapat diamati dalam konteks partisipasi masyarakat di Indonesia adalah pergeseran pola partisipasi seiring dengan perubahan sosial. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui gotong royong masih menjadi salah satu bentuk partisipasi sosial yang kuat, khususnya di wilayah perdesaan dan komunitas tingkat RT/RW. Pemerintah melalui program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) secara rutin menggalakkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, gotong royong, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan sosial dan budaya. Namun demikian, data BPS juga mencatat penurunan tingkat partisipasi gotong royong hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah yang mengalami urbanisasi pesat dan perubahan gaya hidup menuju individualisme. Fenomena ini mencerminkan perubahan nilai sosial yang signifikan, memengaruhi cara warga berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka.

Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data BPS (2024), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lampung Tengah mencapai 73,51%. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia produktif dan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun, kesibukan kerja justru berimplikasi pada menurunnya keterlibatan dalam aktivitas sosial, termasuk gotong royong. Masyarakat yang semakin disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari sering kali mengalami keterbatasan waktu untuk ikut serta dalam kegiatan kolektif. Di Bandar Jaya Barat, tantangan serupa mulai dirasakan. Data penduduk tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Bandar Jaya mencapai 8.471 jiwa, dengan komposisi sosial yang beragam. Sementara itu, di tingkat RT 002/RW 001 Lingkungan 1 terdapat 80 Kepala Keluarga (KK). Skala komunitas yang relatif sedang ini seharusnya memudahkan koordinasi kegiatan gotong royong, namun kenyataannya partisipasi masyarakat tetap tidak merata. Sebagian warga aktif berkontribusi, sementara lainnya bersikap pasif bahkan tidak terlibat sama sekali. Perubahan demografis seperti meningkatnya migrasi penduduk, pergeseran struktur keluarga, serta meningkatnya kesibukan kerja semakin memperkuat munculnya sikap individualisme. Akibatnya, kebiasaan gotong royong di lingkungan RT 002/RW 001 mengalami penurunan kualitas dan intensitas, dengan respons warga yang beragam terhadap ajakan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, penting pula untuk menelaah kondisi nyata di lapangan, khususnya di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat. Partisipasi warga dalam gotong royong di tingkat ini sangat bervariasi; ada yang aktif berkontribusi, sementara sebagian lain bersikap pasif atau bahkan tidak terlibat sama sekali. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari peran dan kepemimpinan RT, tingkat solidaritas sosial antarwarga, sampai unsur kesibukan individu dan motivasi personal. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam memahami bagaimana partisipasi gotong royong berjalan serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga tradisi sosial ini.

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran individu bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas dan memiliki tanggung jawab bersama sangat berperan penting. Kesadaran ini mendorong warga untuk secara sukarela berkontribusi dalam kegiatan gotong royong demi kepentingan bersama.

2. Faktor Motivasi dan Kerjasama

Motivasi personal, rasa kebersamaan, dan kerjasama antarwarga menjadi pendorong aktifnya partisipasi. Apabila kerjasama berjalan dengan baik, warga merasa termotivasi untuk ikut serta.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana

Ketersediaan fasilitas pendukung, seperti alat kerja atau tempat berkumpul, juga menjadi faktor yang memengaruhi partisipasi. Sarana yang memadai memudahkan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan minat warga untuk berpartisipasi.

4. Faktor Kepemimpinan

Peran serta kepemimpinan RT, RW, dan tokoh masyarakat yang efektif sangat menentukan tingkat keterlibatan masyarakat. Kepemimpinan yang mampu mengorganisir dan mengajak warga akan meningkatkan partisipasi.

5. Faktor Sosialisasi dan Pendidikan

Sosialisasi yang intens dan pendidikan terkait pentingnya gotong royong dapat meningkatkan pemahaman warga sehingga mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi.

6. Faktor Solidaritas Sosial

Tingkat solidaritas dan hubungan sosial yang harmonis antarwarga memperkuat rasa saling memiliki sehingga partisipasi dalam gotong royong bisa terjaga.

Di wilayah Bandar Jaya Barat, khususnya di RT 002/RW 001 Lingkungan 1, beberapa faktor tersebut sangat nyata memengaruhi partisipasi gotong royong

masyarakat. Faktor kesadaran dan solidaritas sosial masih kuat di antara sebagian warga, terutama yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kedekatan emosional. Namun, kesibukan warga, terutama yang bekerja di luar desa atau beraktivitas di luar jam gotong royong, lalu pemuda-pemudi yang sedang menempuh pendidikan yang jauh di luar kota, menjadi hambatan utama dalam keterlibatan mereka bergotong royonh. Peran kepemimpinan RT juga cukup krusial dalam menggerakkan dan mengajak warga, meskipun tantangan dalam menjangkau semua segmen masyarakat tetap ada. Selain itu, sarana dan fasilitas yang terkadang kurang memadai seperti mobil bak untuk mengangkut sampah, menjadi kendala tambahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan gotong royong di RT 002/RW 001. Hal tersebut tampak jelas dalam praktik gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1. Misalnya, kegiatan gotong royong membersihkan makam dan membuat gorong-gorong yang sering kali hanya diikuti oleh sebagian warga, terutama bapak-bapak yang memiliki waktu luang di akhir pekan. Semenetara itu, banyak pemuda yang tidak hadir karena bekerja di luar kota atau sedang menempuh pendidikan, sehingga beban gotong royong lebih banyak ditanggung oleh warga yang lebih tua atau mereka yang sehari-harinya di rumah. Peran ibu-ibu biasanya terlihat dalam menyediakan makan siang atau konsumsi bagi yang bekerja, sedangkan koordinasi kegiatan bergantung pada arahan ketua RT melalui kumpulan rutin setiap minggu, bisa juga dari grup WhatsApp, atau terkadang pun bisa mengumumkannya lewat toa masjid. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di tingkat RT tidak merata dan masih sangat dipengaruhi oleh faktor internal (motivasi, kesadaran, solidaritas) maupun eksternal (kepemimpinan, dan kesibukan).

Dengan melihat kondisi tersebut, penting untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam gotong royong tidak hanya bermakna sosial-budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip administrasi publik, terutama *community participation* dan *good governance*. Transparansi dapat dilihat dari keterbukaan informasi yang disampaikan pengurus RT mengenai jadwal dan tujuan kegiatan gotong royong. Akuntabilitas tercermin dari laporan hasil kegiatan, seperti lingkungan yang lebih bersih atau fasilitas umum yang diperbaiki. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi aspek kunci karena keterlibatan warga secara

sukarela memperlihatkan adanya *community participation* dalam tata kelola pemerintahan lokal. Namun, ketika partisipasi belum merata, prinsip *good governance* belum sepenuhnya tercapai karena masih ada kelompok masyarakat yang pasif atau tidak terlibat. Dengan demikian, gotong royong di RT 002 dapat menjadi cerminan penting bagaimana partisipasi masyarakat mendukung atau justru menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang serupa dengan yang ditemukan di RT 002/RW 001, Bandar Jaya Barat. Misalnya, penelitian Fitria et al. (2023) di Desa Penggalangan menunjukkan bahwa kesadaran dan tanggung jawab sosial menjadi pendorong utama partisipasi warga dalam gotong royong. Hal ini sejalan dengan kondisi di Bandar Jaya, di mana kesadaran sosial dan solidaritas tetap kuat dalam sebagian kelompok warga meskipun terdapat tantangan kesibukan dan gaya hidup individualisme. Penelitian Rendi (2017) di Desa Batu Timbau, Kutai Timur juga menemukan bahwa kesibukan kerja dan gaya hidup modern merupakan hambatan serius bagi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan bersama. Fenomena tersebut juga terlihat di Bandar Jaya Barat, di mana kesibukan masyarakat menjadi faktor dominan yang menyebabkan menurunnya partisipasi dalam kegiatan gotong royong. Berbeda dengan temuan penelitian di desa lain yang menyoroti rendahnya peran tokoh masyarakat, di wilayah ini kepemimpinan RT justru masih memainkan peran penting dalam menggerakkan keterlibatan warga. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul et al. (2025) di Desa Lagadar turut memperlihatkan bahwa gotong royong tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan sosial sebagai wujud kebersamaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa partisipasi aktif pemuda menjadi faktor penentu keberhasilan gotong royong, meskipun tantangan berupa kesibukan warga dan adanya kelompok yang sulit disatukan tetap hadir. Kondisi ini sejalan dengan realitas di Bandar Jaya Barat, di mana partisipasi warga dipengaruhi oleh kesibukan individu serta hambatan sosial dalam menjaga solidaritas. Meskipun kajian mengenai gotong royong di tingkat desa telah banyak dilakukan, penelitian

yang menyoroti dinamika partisipasi pada level RT di kawasan semi-perkotaan seperti Bandar Jaya Barat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai dinamika partisipasi pada unit komunitas terkecil.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di Indonesia, khususnya di RT 002/RW 001 Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat, masih menghadapi banyak tantangan. Ini terjadi meskipun sebagian kelompok warga masih menjunjung tinggi nilai solidaritas sosial. Tidak merata partisipasi disebabkan oleh perubahan pola hidup, kesibukan kerja, dan pengurangan partisipasi generasi muda. Meskipun demikian, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat pembangunan berbasis komunitas. Akibatnya, sangat penting bahwa penelitian ini dilakukan untuk mempelajari secara menyeluruh jenis partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong, komponen yang memengaruhinya, dan bagaimana hal itu berdampak pada praktik administrasi publik di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong maupun menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat?
3. Bagaimanakah kontribusi partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong terhadap praktik administrasi publik, khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong di RT 002/RW 001, Lingkungan 1, Bandar Jaya Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong serta menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
3. Menjelaskan kontribusi partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong terhadap praktik administrasi publik, khususnya dalam mendukung penerapan *good governance* di tingkat lokal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas.
- Memperkaya literatur akademik tentang keterkaitan antara nilai budaya gotong royong dengan praktik administrasi publik modern.

2. Manfaat Praktis

- Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab bersama.
- Bagi RT/RW: Menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Bagi peneliti lain: Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai partisipasi masyarakat, pembangunan partisipatif, dan administrasi publik berbasis lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, M. I., & Yuwanto, L. (2023). Gotong royong sebagai budaya bangsa Indonesia ditinjau dari teori nilai (basic human values theory). *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 4*(2), 490-497. https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1498

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, *35*(4), 216-224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Aulia, N., Simbolon, K. O., Zahra, A. N. A., Winandar, D. P., Hidayat, Z. F., & Fitria, R. (2025). Gotong Royong di Desa Lagadar: Membangun Kebersamaan dengan Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Non formal, 2*(4), 10-10. https://doi.org/10.47134/jpn.v2i4.1712

Bailah, S. S. (2019). *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World development*, *8*(3), 213-235. https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X

Fitria, D., Daulay, M. P., Ramadani, P., Nurhadijah, S., Lubis, L. N., & Ali, M. R. (2023). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN GOTONG–ROYONG DI DESA PENGGALANGAN. *Community Development Journal,* 4(4), 8961-8963. https://core.ac.uk/download/pdf/595493764.pdf

Koentjaraningrat. (1974). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Lestari, T. D., Susanti, T., Faishal, M. N. (2025). *Lampung Tengah dalam Angka 2025.* Lampung Tengah: BPS Kabupaten Lampung Tengah.

Mardiyanta, A. (2013). State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 26*(4), 227-242. https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkpca4c173b68full.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (2018). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569. https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018

Rendi, A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Bergotong Royong di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Sosiatri-Sosiologi, 5*(4), 175-189. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1%20-%20Copy%20(12-27-17-05-45-22).pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunann Nasional dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. https://peraturan.bpk.go.id/details/40694

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesua Nomor 5495. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014